

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bukan lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan secara ekonomi tetapi juga kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum ialah meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Aneta, 2010). Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi persoalan utama bagi bangsa.

Kondisi kemiskinan terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan pangan. Kemiskinan ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan seseorang dalam menyampaikan aspirasi (Tontowi, 2010). Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS, Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang. Dibandingkan Maret 2019, jumlah penduduk miskin menurun 358,9 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2018, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 888,7 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2019 tercatat sebesar 9,22 persen, menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018.

Perkembangan kemiskinan di Indonesia sejak era reformasi bersifat fluktuatif, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. TNP2K adalah organisasi yang dibentuk sebagai

wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Untuk menindaklanjuti Perpres tersebut maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Di negara berkembang kemiskinan menjadi masalah yang cukup rumit walaupun Negara-negara tersebut sudah berhasil dalam melakukan pembangunan ekonominya dengan tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan nasional yang cukup dibilang tinggi, namun telah terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin, sehingga kemiskinan semakin meningkat terutama di wilayah pedesaan.

Pendidikan merupakan sebuah bekal untuk kesejahteraan bagi masyarakat dalam skala besar dan kesejahteraan diri sendiri dalam skala kecil. Jika dalam tingkat pendidikan suatu Negara rendah maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Dengan kurangnya modal pendidikan yang dimiliki, maka masyarakat dalam pelaku ekonomi hanya mampu berusaha di dalam satu bidang pekerjaan saja untuk membiayai kehidupan mereka dan masyarakat tidak memiliki tingkat intelektual yang tinggi untuk mengembangkan usaha dibidang ekonomi lainnya.

Kemiskinan merupakan sebuah gambaran kehidupan di Negara manapun yang dapat mencakup lebih dari satu milyar penduduk di dunia. Menurut Kunarjo dalam Badrul Munir (2002:10), suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari 2 persen per tahun), sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan. Oleh sebab itu maka harus diketahui akar dari penyebab kemiskinan di kalangan masyarakat tersebut.

Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang dapat dibilang sangat serius. Ada langkah awal yang perlu dilakukan dalam membahas masalah ini adalah mengidentifikasi apa sebenarnya yang dimaksud dengan miskin atau kemiskinan itu dan bagaimana mengukurnya. Konsep yang berbeda akan melahirkan cara pengukuran yang berbeda. Setelah itu, dicari faktor-faktor dominan baik yang bersifat kultural maupun struktural) yang menyebabkan kemiskinan. Langkah berikutnya adalah mencari solusi yang relevan untuk memecahkan problem itu strategi mengentaskan kelompok miskin dari lembah kemiskinan) (Sunyoto, 2012:25)

Seperti kemiskinan di daerah pedesaan merupakan masalah yang utama dalam proses pembangunan di daerah pedesaan, karena sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan dan karakteristik sebab kemiskinan struktural yang dialami sangat banyak. Kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran pembangunan yang lebih besar di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan, ini merupakan salah satu faktor penyebab daerah pedesaan semakin tertinggal dan kemiskinan struktural semakin bertambah di daerah pedesaan. Kemiskinan kultural, yaitu disebabkan oleh budaya atau etos kerja seseorang, seperti malas, boros, dan susah menerima inovasi, faktor selanjutnya, kemiskinan struktural, yang disebabkan kebijakan pemerintah yang salah, atau tidak memihak kepada rakyat.

Kenyataan ini tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di wilayah pedesaan, oleh karena itu konsep ini adalah upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang menempatkan pedesaan sebagai prioritas dalam peningkatan ekonomi. Menurut tadjuddin Noer Effendi (1995:215) kebijakan makro dalam memerangi kemiskinan adalah :1)Merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bantuan dana desa seperti INPRES dan BANPRES, 2) perbaikan sarana sosial seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, KB, perbaikan lingkungan atau bisa disebut pertumbuhan, 3) membuat perluasan jangkauan saran keuangan dan mendirikan beberapa institusi kredit, 4) meningkatkan produksi pertanian, terutama infrastruktur, 5) mengembangkan beberapa program wilayah.

Kecamatan Parakan sebagai suatu daerah yang ada di Kabupaten Temanggung tidak luput dari masalah kemiskinan terutama oleh masyarakat pedesaan. Kemiskinan ini terjadi karena pendapatan yang rendah akibat rendahnya produktivitas dan keterampilan, sarana produksi yang digunakan masih sederhana, pendidikan yang rendah, tanggungan keluarga yang tinggi, pertumbuhan penduduk yang tinggi sedangkan tabungan yang rendah. Dengan demikian kemiskinan ini sebuah lingkaran setan yang tidak berujung pangkal dan apabila tidak ditangani dengan serius akan berakibat terhadap masyarakat yaitu kemiskinan.

Menurut data statistik Temanggung, persentase kemiskinan di Temanggung tahun 2018 terdapat 9,87 persen, angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2017, dan angka tersebut juga lebih rendah apabila dibandingkan dengan Jawa Tengah yang bisa mencapai 11,32 persen.

Tabel 1.1
Statistik Kemiskinan Kabupaten Temanggung

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	87,09	86,77	75,39	46,13
Penduduk miskin (%)	11,60	11,46	9,87	7,37

Sumber : Susenas, 2018

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada tanggal 27 november 2019 menunjukkan data kemiskinan kecamatan Parakan, menunjukkan desa Traji peringkat ke 3 dari se kecamatan Parakan. Desa yang menduduki tingkat pertama kemiskinan yaitu desa Kauman karena mencapai 1070 KK, yang kedua desa Mandisari dengan jumlah 586 KK, dan yang ketiga desa Traji dengan jumlah 553 KK. Di desa Traji Kecamatan parakan Kabupaten Temanggung, desa tersebut memiliki angka kemiskinan yang dapat dibilang besar karena bisa mencapai dari setengah KK-nya. Jumlah KK di desa Traji yaitu, 1199 KK dan tingkat kemiskinan di desa Traji mencapai 553 KK.

Tugas pemerintah desa merupakan penyelenggara rumah tangga sendiri, di samping itu pemerintah desa juga dapat dibebani tugas-tugas pembantuan yang

diberikan oleh instansi vertikal (garis menegak) atau daerah otonom atasan. Desa menurut R.H Unang Soenardjo dalam Hanif Nurcholis, dkk (2009: 5) adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Secara tegas dinyatakan bahwa hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri bagi Pemerintah Desa bukanlah hak otonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, tetapi mengatur desa dari segi pemerintahannya yang berdasarkan Demokrasi Pancasila.

Pemerintah desa mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Untuk pembangunan non fisik, sampai saat ini pemerintah desa berperan sebagai penyalur program pengentasan kemiskinan. Program dalam upaya menanggulangi kemiskinan, antara lain penyaluran dana BLT dan raskin. Indikator yang dipakai untuk menentukan rakyat miskin berpatokan pada kriteria yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain : penggunaan air minum, asset, pakaian, penggunaan bahan bakar, kebutuhan makan, tipe rumah, jenis jamban, jenis lantai, konsumsi daging, luas lantai, pendidikan, dan penerangan. Keempat belas kriteria tersebut diatas dijadikan landasan untuk menentukan kriteria kemiskinan penduduk sehingga mereka layak untuk mendapatkan dana ataupun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam kaitan dengan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan angka kemiskinan di desa Traji sangat besar oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk mengambil pokok bahasan skripsi ini dengan menitikberatkan pada upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di desa traji sehingga penulis mengambil judul “upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintahan desa di desa Traji Kecamatan Parakan Temanggung”.

1.1. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintahan desa di desa Traji Kecamatan Parakan Temanggung?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, Untuk mengetahui bagaimana upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintahan desa di desa budaya Traji Kecamatan Parakan Temanggung.

A. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di desa budaya Traji Kecamatan Parakan Temanggung. Oleh karena itu, kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik bagi peneliti-peneliti yang berminat dalam melakukan penelitian terhadap objek serupa
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang kajian ilmu pemerintah tentang penanggulangan kemiskinan masyarakat desa budaya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan atau evaluasi pemerintah desa Traji Kecamatan parakan dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat desa budaya, sehingga diharapkan kemiskinan masyarakat Traji teratasi.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam sub bab ini penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian, khususnya dalam pembahasan upaya pemerintah dalam pengentasan atau mengurangi kemiskinan. Sehingga dapat

diambil kesimpulannya mengenai perbedaan dan persamaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian lain yang terdahulu.

Berdasarkan Royat, S. (2007). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan. Dalam jurnal ini lebih terfokus dengan kebijakan pemerintah dalam kecepatan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, dengan cara : 1) menaikkan sebuah anggaran yang berkaitan baik secara langsung ataupun tidak melalui pendekatan pemberdayaan yang berbasis komunitas, 2) mendorong APBD provinsi, kabupaten, dan kota untuk program yang bersangkutan, 3) tetap mempertahankan program yang sudah dijalankan dan, 4) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

Menurut Prawoto, Nano.(2009). Tak selamanya kebijakan yang disusun oleh pemerintah sepenuhnya dapat memberantas kemiskinan, kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah masih mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan menyebabkan pemerataan distribusi pendapatan pada tiap lapisan masyarakat. Padahal dalam penanggulangan kemiskinan yang multidimensional perlu dilakukan kajian secara menyeluruh, seperti aspek hukum dan politik, sosial budaya, bahkan agama. Jurnal ini juga membahas membahas faktor kegagalan yang dilihat berdasarkan paradigma kemiskinan yang keliru serta diberikan strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Secara garis besar, kegagalan penanggulangan kemiskinan terjadi saat masalah kemiskinan hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi dan tidak melibatkan masyarakat miskin dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri. Strategi yang ditawarkan oleh Prawoto (2009) ini lebih menitikberatkan pada keikutsertaan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, tidak hanya ekonomi, untuk mengentaskan kemiskinannya sendiri melalui program-program yang berkelanjutan.

Pattinama, M. J. (2009). Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal. Jurnal ini lebih terfokus dengan indikator kemiskinan yang meliputi pola lahan berpindah yang masih subsisten, keterbatasan akses terhadap permodalan dan perbaikan teknologi pertanian dan isolasi dalam arti mahal biaya

transportasi (waktu dan tenaga).Kedua komunitas mengandalkan tenaga kerja sendiri dan keluarga, produksi terbatas di lahan terbatas serta lemah dalam tawar-menawar dengan pedagang.Akibatnya mereka juga sama-sama berpenghasilan rendah sehingga tidak memiliki akses kepada pendidikan dan kesehatan.Sekali definisi dibuat maka diperlukan komitmen dan upaya berkelanjutan untuk melakukannya, sebab kemiskinan hanya dapat diatasi dengan belajar dari tindakan nyata (learning by doing) bukan sekedar mengumpulkan datanya dan membicarakannya.

Raharjo, T. J., Suminar, T., & Muarifuddin, M. (2016).Peran pusat kegiatan belajar masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendidikan nonformal di Jawa Tengah. Jurnal ini membahas tentang program yang dikembangkan PKBM di Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendidikan nonformal, peran PKBM, hambatan dan dukungan bagi PKBM dalam menyelenggarakan programnya. jenis program yang dikembangkan PKBM di Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan adalah program PAUD, Keaksaraan, Kesetaraan, Kursus dan Pelatihan, KBU, Magang dan program lain. Program Kesetaraan, Kursus dan Pelatihan, serta KBU memiliki posisi dominan. Jenis program paling banyak dikembangkan adalah program kursus dan pelatihan. Adapun peran PKBM yaitu sebagai pusat informasi, belajar masyarakat, pendidikan dan latihan keterampilan serta adanya kemandirian masyarakat yang terbentuk. Hambatan internal belum terpenuhinya penyelenggaraan full beasiswa bagi semua warga belajar dan sulit mencari tutor yang diidealkan. Hambatan eksternal minimnya akses sumber keuangan serta persaingan pemasaran produk.Dukungan internal berupa komitmen yang tinggi dari semua pengelola serta budaya kerja secara kekeluargaan. Dukungan eksternal berupa berbagai dukungan baik dari pihak pemerintah, swasta, berbagai mitra kerja serta media massa yang ikut serta dalam publikasi.

Darwis, Valeriana, & Nurmanaf, A Rozany. (2001). yang berjudul Pengentasan Kemiskinan, Upaya Yang Telah Dilakukan Dan Rencana Waktu Mendatang. Dalam jurnal ini menjelaskan ada hal yang menyebabkan kondisi kemiskinan yang mana salah satunya adalah krisis ekonomi.Banyak upaya yang

telah dilakukan pemerintahan untuk memperbaiki kemiskinan yang diakibatkan oleh krisis tersebut. Namun banyak upaya yang belum tepat yang menyebabkan penanggulangan kemiskinan terhambat atau tidak sesuai karena tidak sesuai dengan data yang akurat. Seperti contohnya upaya pemerintah yang terdiri dari Jaminan Pengaman Sosial (JPS), Ketahanan Pangan, Perlindungan Sosial, Penyediaan Lapangan Kerja dan Sumber Pendapatan, dan Kredit Murah. Namun perlu adanya kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan definisi dari kemiskinan yang terdiri dari kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara untuk mengentaskan kemiskinan.

Harianto, S. (2015). Yang berjudul Relasi Orang Miskin dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, terfokus dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang sebenarnya telah lama dilakukan oleh pemerintah, namun tidak berdampak secara signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Masyarakat miskin di wilayah pedesaan sebenarnya telah tersentuh oleh berbagai macam program penanggulangan kemiskinan empat klaster, namun, di mata masyarakat dan aparatur birokrasi desa, program-program itu bersifat langsung, top down, karitatif, dan berjangka pendek. Alih-alih program-program semacam ini menanggulangi kemiskinan, justru memunculkan kemiskinan baru dengan adanya fenomena rumah tangga yang berasal dari strata sosial menengah dan atas memiskinkan diri. Salah satu penyebab program penanggulangan kemiskinan tidak efektif adalah terjadinya disfungsi sosialisasi program penanggulangan kemiskinan di level desa. Program-program penanggulangan kemiskinan ternyata hanya mampu meringankan beban rumah tangga miskin, namun tidak mampu mengentaskan rumahtangga miskin dari perangkap kemiskinan. Agar program penanggulangan kemiskinan mempunyai dampak signifikan hendaknya ada perbedaan antara program kemiskinan untuk rumah tangga miskin usia produktif dan usia tidak produktif.

Asna Aneta yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan kemiskinan Perkotaan (P2KP) di kota Gorontalo. Penelitian ini terlihat bahwa terdapat beberapa bentuk implementasi kebijakan program

penanggulangan kemiskinan, di dalam jurnal ini penulis juga menjelaskan bagaimana tingkat keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan serta terdapat faktor yang mempengaruhi terlaksananya implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo.

Nugraha, Irwan Abdu. (2017), yang berjudul *Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen)*, menjelaskan kebijakan pengentasan kemiskinan sangat sulit dilakukan karena harus menggabungkan pemahaman dari berbagai macam aspek. Banyak program-program pemerintahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui proses kajian berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah. Data yang tidak terintegrasi antara pemerintahan dan BPS sering menjadi hambatan karena ketidaksinkronan antara data dengan kondisi di lapangan. Program-program yang sudah dirumuskan juga harus menemui permasalahan lapangan yaitu proses pelayanan birokrasi yang panjang untuk masyarakat miskin.

Sedangkan menurut Rahman, N. A. yang berjudul *Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut*. Yang terfokus kepada pengukuran, bahwa kinerja implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut terbilang rendah. PNPM Mandiri Pariwisata gagal dalam mencapai long-term outcome yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa wisata. Hal ini terjadi karena setidaknya dua faktor, yaitu disposisi implementor dan format kebijakan. Berdasarkan kedua faktor tersebut, penulis memberikan rekomendasi kebijakan agar kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata menjadi lebih baik di masa yang akan datang, yaitu dengan: (1) memodifikasi kebijakan; (2) memodifikasi wujud kebijakan/program; (3) merinci metode monitoring dan evaluasi; dan (4) merinci poin pemberian sanksi dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Ras, A. A. yang berjudul *Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya pengentasan kemiskinan*, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya

memenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, rendahnya pendapatan masyarakat tetapi juga ketidakberdayaan dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintahan rezim Orde Baru maupun pemerintahan Era Reformasi untuk menanggulangi kemiskinan, dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan top down maupun pendekatan bottom up, serta merumuskan. Berbagai kebijakan program, baik program bantuan sosial maupun program berbasis pemberdayaan. Program pemberdayaan dilakukan untuk melibatkan masyarakat secara penuh, mulai dari identifikasi masalah, merumuskan, merencanakan sampai kepada tahap pelaksanaan dan evaluasi program. yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

No	Judul	Penulis	Hasil Penelitian
1	Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan	Royat, S.	Kebijakan pemerintah dalam kecepatan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, dengan cara : 1) menaikan sebuah anggaran yang berkaitan baik secara langsung ataupun tidak melalui pendekatan pemberdayaan yang berbasis komunitas, 2) mendorong APBD provinsi, kabupaten, dan kota untuk program yang bersangkutan, 3) tetap mempertahankan program yang sudah dijalankan dan, 4) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.
2	Memahami Kemiskinan Dan Strategi	Prawoto, Nano	faktor kegagalan yang dilihat berdasarkan paradigma kemiskinan yang keliru serta diberikan strategi

	Penanggulangannya		dalam penanggulangan kemiskinan. Secara garis besar, kegagalan penanggulangan kemiskinan terjadi saat masalah kemiskinan hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi dan tidak melibatkan masyarakat miskin dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri. Strategi yang ditawarkan oleh Prawoto (2009) ini lebih menitikberatkan pada keikutsertaan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, tidak hanya ekonomi, untuk mengentaskan kemiskinannya sendiri melalui program-program yang berkelanjutan.
3	Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal	Pattinama, M. J.	Ada beberapa indikator kemiskinan yang meliputi pola lahan berpindah yang masih subsisten, keterbatasan akses terhadap permodalan dan perbaikan teknologi pertanian dan isolasi dalam arti mahal nya biaya transportasi (waktu dan tenaga). Kedua komunitas mengandalkan tenaga kerja sendiri dan keluarga, produksi terbatas di lahan terbatas serta lemah dalam tawar-menawar dengan pedagang. Akibatnya mereka juga sama-sama berpenghasilan rendah sehingga

			tidak memiliki akses kepada pendidikan dan kesehatan. Sekali definisi dibuat maka diperlukan komitmen dan upaya berkelanjutan untuk melakukannya, sebab kemiskinan hanya dapat diatasi dengan belajar dari tindakan nyata (learning by doing) bukan sekedar mengumpulkan datanya dan membicarakannya.
4	Peran pusat kegiatan belajar masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendidikan nonformal di Jawa Tengah.	Raharjo, T. J., Suminar, T., & Muarifuddin, M.	program yang dikembangkan PKBM di Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendidikan nonformal, peran PKBM, hambatan dan dukungan bagi PKBM dalam menyelenggarakan programnya. jenis program yang dikembangkan PKBM di Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan adalah program PAUD, Keaksaraan, Kesetaraan, Kursus dan Pelatihan, KBU, Magang dan program lain. Program Kesetaraan, Kursus dan Pelatihan, serta KBU memiliki posisi dominan. Jenis program paling banyak dikembangkan adalah program kursus dan pelatihan. Adapun peran PKBM yaitu sebagai pusat informasi, belajar masyarakat,

			<p>pendidikan dan latihan keterampilan serta adanya kemandirian masyarakat yang terbentuk. Hambatan internal belum terpenuhinya penyelenggaraan <i>full</i> beasiswa bagi semua warga belajar dan sulit mencari tutor yang diidealkan. Hambatan eksternal minimnya akses sumber keuangan serta persaingan pemasaran produk. Dukungan internal berupa komitmen yang tinggi dari semua pengelola serta budaya kerja secara kekeluargaan. Dukungan eksternal berupa berbagai dukungan baik dari pihak pemerintah, swasta, berbagai mitra kerja serta media massa yang ikut serta dalam publikasi.</p>
5	<p>Pengentasan Kemiskinan : Upaya Yang Telah Dilakukan Dan Rencana Waktu Mendatang.</p>	<p>Darwis, Valeriana, & Nurmanaf, A Rozany</p>	<p>Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintahan untuk memperbaiki kemiskinan yang diakibatkan oleh krisis tersebut. Namun banyak upaya yang belum tepat yang menyebabkan penanggulangan kemiskinan terhambat atau tidak sesuai karena tidak sesuai dengan data yang akurat. Seperti contohnya upaya pemerintah yang terdiri dari Jaminan Pengaman Sosial (JPS),</p>

			<p>Ketahanan Pangan, Perlindungan Sosial, Penyediaan Lapangan Kerja dan Sumber Pendapatan, dan Kredit Murah. Namun perlu adanya kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan definisi dari kemiskinan yang terdiri dari kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara untuk mengentaskan kemiskinan.</p>
6	<p>Relasi Orang Miskin dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan</p>	<p>Harianto, S.</p>	<p>Masyarakat miskin di wilayah pedesaan sebenarnya telah tersentuh oleh berbagai macam program penanggulangan kemiskinan empat klaster, namun, di mata masyarakat dan aparatur birokrasi desa, program-program itu bersifat langsung, top down, karitatif, dan berjangka pendek. Alih-alih program-program semacam ini menanggulangi kemiskinan, justru memunculkan kemiskinan baru dengan adanya fenomena rumah tangga yang berasal dari strata sosial menengah dan atas memiskinkan diri. Salah satu penyebab program penanggulangan kemiskinan tidak</p>

			<p>efektif adalah terjadinya disfungsi sosialisasi program penanggulangan kemiskinan di level desa. Program-program penanggulangan kemiskinan ternyata hanya mampu meringankan beban rumah tangga miskin, namun tidak mampu mengentaskan rumahtangga miskin dari perangkap kemiskinan. Agar program penanggulangan kemiskinan mempunyai dampak signifikan hendaknya ada perbedaan antara program kemiskinan untuk rumah tangga miskin usia produktif dan usia tidak produktif.</p>
7	<p>Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo</p>	Aneta, A.	<p>Bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah Kota Gorontalo tinggi dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, masyarakat menerima dan mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur</p>

			birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan P2KP di Kota Gorontalo.
8	Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen)	Nugraha, Irwan Abdul	Kebijakan pengentasan kemiskinan sangat sulit dilakukan karena harus menggabungkan pemahaman dari berbagai macam aspek. Banyak program-program pemerintahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui proses kajian berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah. Data yang tidak terintegrasi antara pemerintahan dan BPS sering menjadi hambatan karena ketidaksinkronan antara data dengan kondisi di lapangan. Program-program yang sudah dirumuskan juga harus menemui permasalahan lapangan yaitu proses pelayanan birokrasi yang panjang untuk masyarakat miskin.
9	Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut.	Rahman N.A	pengukuran, didapat hasil bahwa kinerja implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut terbilang rendah. PNPM Mandiri Pariwisata gagal dalam mencapai long-term outcome yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa wisata.

			<p>Hal ini terjadi karena setidaknya dua faktor, yaitu disposisi implementor dan format kebijakan. Berdasarkan kedua faktor tersebut, penulis memberikan rekomendasi kebijakan agar kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata menjadi lebih baik di masa yang akan datang, yaitu dengan: (1) memodifikasi kebijakan; (2) memodifikasi wujud kebijakan/program; (3) merinci metode monitoring dan evaluasi; dan (4) merinci poin pemberian sanksi dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO).</p>
10	<p>Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya pengentasan kemiskinan</p>	Ras, A.A	<p>Pemerintahan Era Reformasi untuk menanggulangi kemiskinan, dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan top down maupun pendekatan bottom up, serta merumuskan berbagai kebijakan program, baik program bantuan sosial maupun program berbasis pemberdayaan. Program pemberdayaan dilakukan untuk melibatkan masyarakat secara penuh, mulai dari identifikasi masalah, merumuskan, merencanakan sampai kepada tahap pelaksanaan dan evaluasi</p>

			program.yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
--	--	--	---

Berdasarkan dari 10 literatur yang digunakan oleh peneliti maka ada persamaan dan perbedaaan terhadap penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini persamaan terletak pada fokus persoalan yakni melihat bagaimana menuntaskan persoalan kemiskinan di tingkat desa, namun perbedaanya ialah peneliti memakai teori yang baru dan belum ada yang meneliti desa Traji, sementara dari 10 literatur yang diatas tidak ada satupun penelitian yang meneliti tentang kasus kemiskinan yang terjadi di desa Traji.Oleh karena itu dengan memfokuskan kepada kasus persoalan kemiskinan di desa budaya ini, maka peneliti merasa bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dibandingkan peneliti sebelum-sebelumnya.

C. Kerangka Teori

1. Pengentasan Kemiskinan

a. Definisi PengentasanKemiskinan

Kemiskinan menyebabkan kualitas hidup seseorang terjebak dalam limbah kesengsaraan hidup baik secara kualitatif maupun kuantitatif.Istilah kemiskinan juga muncul ketika seseorang atau kelompok orang dalam hal ini dapat diartikan suatu Negara tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang merasakan kondisi serba kekurangan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebabkan oleh tingkat penghasilan dan ekonominya rendah.

Friedman (1997) mengartikan kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud dengan basis kekuasaan sosial menurut Friedman meliputi :

- a. Modal produktif atas asset, seperti: tanah permuahan, peralatan, dan kesehatan.
- b. Sumber keuangan, seperti: income dan kredit yang memadai
- c. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan Bersama, seperti: koperasi.
- d. Network atau jaringan social untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai
- e. Informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai masalah sosial yang jauh lebih kompleks dari sekedar persoalan kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya asset produksi untuk melangsungkan kehidupan. Chambers (1987) berpendapat dalam buku yang ditulis oleh Suyatno dengan judul *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penangannya* bahwa kemiskinan tidak hanya identik dengan ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan juga menyangkut kerentanan, ketidakberdayaan, keterrisolasi dan kelemahan jasmani.

Noor (2014:133) mengklarifikasi jenis-jenis kemiskinan dalam masyarakat pada umumnya sebagai berikut:

- a. Kemiskinan absolute, yaitu keadaan dimana pendapatan kasar bulanan tidak mencukupi untuk membeli keperluan minimum.
- b. Kemiskinan relative, yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu kebutuhan dengan tingkat pendapatan lainnya.
- c. Kemiskinan structural, yaitu kondisi yang mana sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan.

- d. Kemiskinan kultural yaitu budaya yang membuat orang miskin yang dalam antropologi kemiskinan sebagai adanya budaya miskin.

Sedangkan menurut Andre Bayo Ala (1981) terdapat beberapa aspek yaitu:

- a. Kemiskinan mempunyai sifat yang multidimensional karena menyangkut karakter manusia yang memerlukan berbagai jenis kebutuhan dan terikat dengan berbagai dimensi kehidupan. Kemiskinan memiliki aspek primer yaitu miskin aset, organisasi sosial politik, pendidikan, dan keterampilan. Dan aspek sekunder yaitu miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.
- b. Aspek-aspek kemiskinan saling berkaitan yang berarti bahwa persoalan kemiskinan menyangkut dimensi kehidupan individu dan sosial ekonomi dan non ekonomi, yang saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak secara langsung.
- c. Kemiskinan juga menyangkut nasib kehidupan manusia yang berarti persoalan kemiskinan tergantung bagaimana menyikapinya.

Dalam arti luas (Chambers dalam Criswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi yaitu,

- a. Kemiskinan
- b. Ketidakberdayaan
- c. Kerentanan menghadapi situasi darurat
- d. Ketersaingan baik secara geografis maupun sosiologis.

Dari beberapa definisi diatas tentang kemiskinan , secara umum semuanya menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kurang atau tidak layak hidup menurut standar-standar tertentu. Kurang kemampuan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan.

b. Ciri-ciri kemiskinan

Menurut Suyatno (2014:5) merumuskan beberapa ciri dari kemiskinan, yaitu :

- a. Orang yang hidup dibawah garis kemiskinan tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan lainnya. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- b. Orang yang memiliki kemampuan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan maupun modal usaha.
- c. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka habis tersisa untuk mencari nafkah sehingga berpeluang untuk tidak belajar. Anak-anak mereka tidak dapat menyelesaikan sekolah karena harus membantu orangtuanya mencari tambahan penghasilan atau menjaga adik-adik dirumah, sehingga secara turun-temurun terjat dalam keterbelakangan garis kemiskinan.
- d. Kebanyakan mereka yang tinggal di pedesaan. Banyak diantara mereka tidak memiliki tanah, walaupun ada itu dapat dibidang kecil. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar pertanian. Karena petani hanya bekerja dengan musiman, maka kesinambungan kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas (self employed) berusaha apa saja. Dalam keadaan penawaran tenaga yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurangi mereka dibawah tingkatkemiskinan.

c. Penyebab Kemiskinan :

Kemiskinan terjadi pada seseorang atau individu bukan semata-mata tanpa adanya penyebab yang jelas. Kuncoro (dalam Rubiyannah, 2016:4) menjelaskan penyebab kemiskinan sebagai berikut:

- a. Secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul karena perbedaan sebuah kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah dan mempengaruhi upah yang mengakibatkan upah juga rendah.
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal.

Sedangkan dalam perspektif islam kemiskinan timbul karena berbagai sebab structural diantaranya :

- a. Kemiskinan timbul karena ketidakpedulian kelompok kaya (QS Ali Imran : 180), menimbun harta (QS Al Ma'aarij : 18) sehingga si miskin tidak dapat keluar dari kemiskinannya.
- b. Kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas sebagai manusia lain, seperti memakan harta orang lain secara bathil (QS At Taubah:34) dan memakan harta anak yatim (QS An Nissa' : 2, 6,10) dan memakan harta ribat (QS Al Baqarah : 275).
- c. Kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi disatu tangan. Hal ini tergambar dalam kisah fir'aun, haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat mesir dimasa hidup Nabi Musa as (QS Al Qashash : 1-88).
- d. Peperangan yang menciptakan para pengungsi miskin yang terusir dari negertinya (QS Al Hasyr : 8-9).

d. Pengentasan kemiskinan

Dalam melakukan penanggulangan kemiskinan diperlukan strategi yaitu, kegiatan pemberdayaan. Masyarakat yang miskin, misalnya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kalangan masyarakat perlu adanya program-program pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat. Menurut suyono (dalam Anwas, 2013:84), penanggulangan kemiskinan menuju keluarga sejahtera perlu memasukan variabel non ekonomi. Hal ini disebabkan karena pengentasan kemiskinan tidak sekedar menyangkut pendapatan, akan tetapi perlunya dilakukan secara holistic yang menyangkut kehidupan dasar manusia. Orang menjadi miskin bukan hanya karena dia tidak mempunyai modal usaha atau tidak punya aset produksi, akan tetapi ia berpotensi tetap miskin karena dia tidak memiliki penyangga ekonomi.

Dengan adanya kegiatan pemberdayaan, individu dan masyarakat didasarkan potensi yang ada pada diri dan lingkungannya. Setelah itu mereka didorong untuk mau melakukan perubahan yang dimulai dari dalam dirinya, seperti hal-hal kecil yang dapat dimulai oleh individu atau lingkungan. Selanjutnya, memerlukan penguatan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga perubahan akan meningkat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan atau pelatihan serta pendampingan. Setelah itu memberikan sebuah reward kepada masyarakat atau individu yang sudah mencapai prestasi. Keberhasilan proses ini akan ditandai dengan adanya perubahan perilaku individu ataupun masyarakat ke arah yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Tahapan ini sangat penting dilakukan sebagai sebuah motivasi bagi individu maupun lingkungan. Dan tahapan ini dapat dilakukan dengan cara bertahap dan seimbang.

Ada dua macam perspektif yang mendekati masalah kemiskinan, yaitu: perspektif kultural, dan perspektif struktural atau situasional. Masing-masing perspektif memiliki tekanan, acuan dan metodologi sendiri yang beda dalam menganalisis sebuah masalah kemiskinan. Perspektif struktural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis, yaitu:

individu, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individual, kemiskinan ditandai dengan sifat yang lazim disebut a strong feeling of marginality seperti, sikap parokial, apatisme, fatalism atau pasrah kepada nasib, boros, tergantung atau inferior. Dalam tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar. Sedangkan dalam tingkat masyarakat kemiskinan dapat ditunjukkan dengan tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. Mereka seringkali memperoleh perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap daripada sebagai subyek yang perlu diberi peluang untuk berkembang.

Dalam perspektif situasional, masalah kemiskinan dilihat sebagai dampak dari sebuah sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi capital dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi capital antara lain program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan dan kurang memperbaiki permasalahan pembangunan (Usman Sunyoto, 2012:127-128).

Menurut Prayitno dan Santosa (1996), ada beberapa langkah-langkah pengentasan kemiskinan dan ada beberapa yang perlu dipertimbangkan, antara lain :

- a. Program pengentasan kemiskinan akan berjalan baik dan efektif apabila ada suasana tentram dan stabil. Kestabilan diperlukan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan karena pada dasarnya upaya penanggulangan kemiskinan adalah upaya untuk menciptakan ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial dan politik.
- b. Program pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik apabila pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Keluarga kecil yang sejahtera adalah salah satu dari faktor yang kondusif untuk mencapai sasaran menanggulangi kemiskinan.
- c. Program pengentasan kemiskinan akan lebih baik apabila dikaitkan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang tetap lestari dan

terjaga dengan baik memungkinkan distribusi kesejahteraan antar warga masyarakat secara merata.

- d. Program pengentasan kemiskinan harus merupakan program yang berkelanjutan, yaitu program yang dapat terus–menerus berjalan dan dapat mandiri. Hal ini berarti program penanggulangan kemiskinan harus dilandaskan pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar dari suatu kegiatan.
- e. Pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang diupayakan pada tingkatan pemerintahan serendah mungkin. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat di daerah itu sendiri. Dalam hubungan ini, pemerintah daerah harus mengambil peranan yang lebih besar lagi karena mereka yang paling mengetahui mengenai kondisi dan kebutuhan penduduk di kantong kantong kemiskinan di daerahnya. Semakin dekat pelaksana proyek dan kegiatan dengan kelompok sasaran, maka akan semakin efektif
- f. Tekanan yang paling utama seyogyanya diberikan pada perbaikan pelakunya, terutama manusianya (invest in people) menyangkut aspek pendidikan dan kesehatan. Keduanya berkaitan dengan peningkatan akses secara merata dan sekaligus mutu yang lebih baik.
- g. Pelayanan bagi orang jompo, penderita cacat, yatim piatu, dan kelompok masyarakat lain yang memerlukan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya menanggulangi kemiskinan. Program ini bersifat khusus dan dilaksanakan secara selektif. Langkah yang diperlukan adalah meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan jangkauan program tersebut. Searah dengan itu, pengembangan sistem jaminan sosial.

Menurut Isnan Murdiansyah Dalam pengentasan kemiskinan ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu :

- a. Pemberdayaan: peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial untuk memberikan kepercayaan dan peluang kepada masyarakat, Organisasi Sosial, LSM, dunia usaha dan penyandang masalah sosial dalam mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya serta merealisasikan aspirasi dan harapan mereka dalam mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya
- b. Kemitraan: kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan pelaksanaan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dan mengoptimalkan pelayanan-pelayanan yang bersifatterpadu
- c. Partisipasi: prakarsa, peranan dan keterlibatan semua pihak pelaku pembangunan dan penerima pelayanan, lingkungan sosial dan penyedia pelayanan dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

2. Pemerintah Desa

a. Definisi Pemerintah Desa

Desa merupakan subsistem dari pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat. Dalam sebuah sistem pemerintahan Negara Indonesia yang sudah membagi daerah Indonesia atau daerah besar dan kecil, dengan berbagai bentuk dan susunan tingkat pemerintah, pemerintahan desa termasuk tingkatan terendah. Menurut Bayu Suryaningrat, pemerintah desa merupakan sebuah kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintah yang

dilaksanakan oleh organisasi pemerintah terendah langsung dibawah kecamatan, yaitu pemerintah desa atau pemerintah kelurahan.

Menurut Maria Eni Surasih dalam jurnal Heriyanto.A, Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan menurut sudiro, pemerintah desa adalah struktur terendah pemerintahan Negara kita dan merupakan satuan pemerintahan terendah yang berada langsung dibawah kecamatan, sehingga merupakan sebuah tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintah baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.

Pemerintah desa termasuk organ, badan serta pimpinan dalam usaha menyelenggarakan kepentingan atau tujuan secara umum dan khusus bagi kalangan masyarakat dan pemerintah desa menjalankan pemerintahan yaitu segala kegiatan yang terorganisasi bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan dasar Negara untuk mencapai tujuan Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB 1 pasal 1 (12) menyebutkan bahwa, desa atau disebut dengan nama lain, desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah adalah sebuah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, pemberdayaan masyarakat, dan demokrasi. Sedangkan dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada BAB XI pasal 202 disebutkan bahwa pemerintah desa terdiri atas : 1) kepala desa, dan perangkat desa, 2) Perangkat desa terdiri dari sekretarisdesa dan perangkat desa lainnya. Di

dalam bab tersebut juga dijelaskan bahwa pasal 200 (1) untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa maka dibentuk pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa.

Dari pengertian diatas keterlibatan masyarakat dalam proses menentukan sebuah kebijakan merupakan hal yang sangat penting, adanya sebuah pengawasan kekuasaan dan dijaminnya sebuah persamaan perlakuan Negara terhadap semua warga Negara sebagai unsur pokokdemokrasi.

b. Jenis Desa

Dalam sebuah ketatanegaraan Republik Indonesia, desa sudah berkembang berbagai bentuk. Sehingga harus dilindungi dan diberdayakan agar menjadi desa yang mandiri, maju, kuat, dan demokratis. Sehingga dapat membangun sebuah landasan yang kuat dalam menjalankan sebuah pembangunan yang memiliki tujuan adil dan makmur. Di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis desa, yaitu:

1. Desa Swadaya

Desa swadaya merupakan desa yang memiliki potensi tertentu akan tetapi dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, desa swadaya memiliki ciri ciri sebagai berikut :

- Daerah yang terisolir dengan daerah lain
- Memiliki penduduk yang jarang
- Mata pencaharian yang homogen yang bersifat agraris
- Memiliki sifat yang tertutup
- Masyarakat yang dapat memegang teguh adat
- Teknologi yang masih rendah
- Untuk sarana dan prasarana yang masih kurang
- Hubungan yang masih erat
- Memiliki pengawasan social yang dilakukan oleh keluarga

2. Desa Swakarya

Desa swakarya merupakan desa peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Desa swakarya memiliki ciri sebagai berikut :

- Memiliki kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh
- Sudah mulai menggunakan alat-alat dan teknologi
- Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau memiliki letak yang jauh dari pusat perekonomian
- Sudah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain.
- Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah lancar

3. Desa swasembada

Masyarakat desa swasembada sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Desa swasembada memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Sudah banyak berlokasi di ibu kota kecamatan
 - Penduduknya yang sudah padat
 - Tidak memiliki keterikatan dengan adat istiadat
 - Sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa yang lain.
 - Partisipasi masyarakat sudah lebih aktif
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 menjelaskan bahwa jumlah perangkat desa akan ditentukan sesuai klasifikasi desa menurut tingkat perkembangannya. Desa swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi. Desa Swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi, sedangkan untuk Desa Swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi.

c. **Kewenangan Desa**

Desa memiliki sebuah wewenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada sebuah keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, pemberdayaan masyarakat dan demokrasi. Oleh sebab itu desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan pelayanan public.

Menteri Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa

D. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan usaha untuk menjelaskan atau sebagai gambaran yang lebih jelas mengenai batasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lain agar tidak terjadinya kesalahpahaman pengertian. Definisi konseptual yang akan digunakan adalah:

1. Pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan suatu implementasi yang langsung mengarah pada sasaran kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin dengan tujuan-tujuan tertentu.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu cara untuk meningkatkan kemampuan yang masyarakat miliki agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan secara mandiri dan baik.

4. Kemitraan

Kemitraan adalah suatu kerjasama yang melibatkan dua pihak untuk meraih tujuan bersama dan menunaikan kewajiban tertentu serta menanggung resiko bersama dan meraih keberhasilan bersama.

5. Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu keterlibatan seseorang dalam melakukan sesuatu demi mencapai tujuan yang di harapkan.

E. Definisi Oprasional

VARIABEL	INDIKATOR
Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none">• Prakarsa Pemerintah Desa• Keterlibatan Pemerintah Desa dan TPK• Kepedulian Terhadap Kemandirian Ekonomi Desa
Kemitraan	<ul style="list-style-type: none">• Kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Non Pemerintah Desa
Partisipasi	<ul style="list-style-type: none">• Keterlibatan Pemerintah Desa dan Non Pemerintah Desa dalam perencanaan dan Pengambilan Keputusan• Keterlibatan Aktor Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Desa

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Perspektif dan model yang dikembangkan sangat beragam. Sebab itu, tidak mengherankan jika terdapat anggapan bahwa, *qualitative research is many thing to many people* (Denzin dan Loncoln, 1994:4). Meskipun demikian, berbagai bentuk penelitian yang diorientasikan pada metodologi kualitatif memiliki beberapa kesamaan. Secara umum kualitatif terhadap hal-hal berikut :

1. Data disikapi sebagai data verbal atau sebagai sesuatu yang dapat ditransformasikan sebagai data verbal.
2. Diorientasikan pada pemahaman makna baik itu merujuk pada ciri, hubungan sistematis, konsepsi, nilai, kaidah, dan abstraksi formulasi pemahaman.
3. Mengutamakan hubungan secara langsung antara peneliti dengan hal yang diteliti. Mengutamakan peran peneliti sebagai instrumen kunci. (Suwandi dan Basrowi, 2008 hal 21).

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Parakan dan Kelurahan Traji Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data yang adapun jenis data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Data primer adalah data penelitian yang didapatkan secara langsung dari informan ataupun narasumber terkait dengan penelitian sehingga mampu memberikan informasi tentang variabel dari suatu penelitian, data biasanya diperoleh dengan observasi, wawancara dan juga dokumentasi (Retnandri, 2012).

Informan	Jabatan	Jumlah
Aparatur Desa	- Kepala Desa Traji Parakan, Temanggung - Sekertaris Desa Traji Parakan, Temanggung - Kesra Desa Traji Parakan, Temanggung	3 Orang
Masyarakat	- Tokoh Masyarakat	3 Orang
BPD	- Ketua BPD Traji Parakan, Temanggung - Sekertaris BPD Traji Parakan, Temanggung	2 Orang
JUMLAH	-	8 informan

2. Data sekunder adalah sekumpulan data yang mengacu pada berbagai informasi dari sumber sudah ada. Sumber data sekunder merupakan catatan atau dokumentasi dari perusahaan, publikasi dari pemerintahan, analisis industry yang sudah dilakukan oleh media, situs Website, internet dan seterusnya (Retnandri, 2012). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Pengumpulan data diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Membaca jurnal terkait ataupun data yang terdapat di situs internet
2. Mencari data kemiskinan dari 2018 sampai 2019

4. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maksud diadakannya seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) antara lain : mengontruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan mendatang. Memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota (Suwandi dan Basrowi 2008:128).

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada tersedia dalam catatan dokumen. Dalam peneliti social, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. (Suwandi dan Basrowi 2008:158).

6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1992, dalam Moleong, 2012:248) analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian yang kaya data tidak akan berarti

sama sekali jika data tersebut tidak dirangkai dalam struktur makna yang logis.(Agus Salim, 2006:20)

Proses-proses analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
3. Penyajian data, yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasiya.

penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kualitas, dan proposisi. Jika penelitian masih berlangsung, maka setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid